

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang

Oleh : Dian Putri

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya pelaksanaan tugas koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan kegiatannya masih dilaksanakan secara parsial oleh SKPD di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang; 2) mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang; dan 3) mengetahui upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling dan snowball sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis kualitatif. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan data dianalisis dengan langkah sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang sudah berjalan namun belum mencapai hasil yang optimal, dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh pokja pendataan dan sistem informasi, pokja pengembangan kemitraan dan pokja pengaduan masyarakat. Kemudian implementasi kebijakan pembentukan TKPK Kota Padang terkendala oleh kurangnya pemahaman SKPD terhadap program penanggulangan kemiskinan, kurangnya koordinasi yang terjalin antara sekretariat TKPK Kota Padang dengan SKPD terkait, serta minimnya anggaran untuk melaksanakan kebijakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan pembentukan TKPK adalah memberikan pemahaman kepada SKPD tentang upaya penanggulangan kemiskinan; menunjuk nama penanggung jawab pengelola pada setiap SKPD; menyepakati jadwal pelaksanaan rapat dan mengadakan rapat-rapat mendadak yang langsung dipimpin oleh ketua TKPK; meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang ada pada masing-masing dinas tiap tahunnya dan bekerja sama dengan BAZDA Kota Padang.